

SKRIPSI

**MODEL PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI
KELURAHAN SIDODADI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



DISUSUN OLEH:

YUNITA

NIM D0320304

PROGRAM STUDI

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

LEMBAR PENGESAHAN
MODEL PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN
SIDODADI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SKRIPSI

Oleh

YUNITA

NIM:D0320304



(Program Studi Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota)


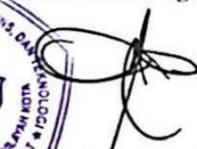


Universitas Sulawesi Barat

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota

Tgl, 10 Desember 2024

Mengetahui

Pembimbing 1	Pembimbing 2
 Ir. Ra'ud Mahful, S.T., M.Eng.,IAP NIP 199301062022031010	 Windy Septi Sintia, ST., MT NIDN 0001099201

 Koordinator Program Studi  Ade Mulawarman, S.T.,M.Si NIP 19870621 201903 007	 Dekan Fakultas Teknik  Dr. Ir. Hafsa Nirwana, M.T NIP-19640405 199003 2 002
---	--

ABSTRAK

Pengelolaan pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk merancang model pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode *mixed method* dengan pendekatan Desain Triangulasi Konkuren. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (regresi logistik). Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh minimnya kesadaran, pengetahuan, fasilitas dan dukungan pemerintah. Model pengelolaan sampah yang efisien adalah model terpadu yang menekankan optimalisasi fasilitas “MATAPPA”, pengembangan sistem pemilahan sampah, dan peningkatan layanan transportasi sampah.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, model terpadu, Kelurahan Sidodadi.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan sektor perekonomian pada akhirnya menimbulkan permasalahan lingkungan, sosial, dan budaya. Salah satu permasalahan lingkungan yaitu sampah. Sampah adalah materi yang dihasilkan dari kegiatan manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Doni,2008:28). Sampah merupakan masalah isu yang signifikan dalam konteks lingkungan, terutama di kalangan masyarakat. Jika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan efektif dan teratur, maka masalah tersebut dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan secara keseluruhan. Salah satu dampak yang mungkin timbul adalah kerusakan ekosistem, yang pada akhirnya dapat berimplikasi negatif pada kehidupan sosial masyarakat. Contoh dampak potensial termasuk penyebaran penyakit dan degradasi kualitas kota atau daerah secara umum.

Permasalahan sampah juga sering ditemui di kawasan perkotaan seperti yang terjadi di Kecamatan Wonomulyo khususnya di Kelurahan Sidodadi. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perancangan Tata Ruang Nomor 2 tahun 2013 dalam pasal 39 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa Kawasan strategis perkotaan Wonomulyo sebagai pusat kegiatan perdagangan. Dalam konteks ini, Kelurahan Sidodadi berperan penting dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut yang berada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan Kelurahan Sidodadi sebagai kawasan perdagangan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk dan secara signifikan berkontribusi terhadap permasalahan sampah yang melanda daerah tersebut. Permasalahan sampah yang terjadi di daerah disebabkan oleh kurangnya pengelolaan sampah yang efektif, karena tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

Berdasarkan penelitian oleh Fadly Muhammad pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, karena rendahnya partisipasi masyarakat. Masyarakat cenderung menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga peran aktif masyarakat menjadi aspek yang sering diabaikan. Fenomena ini

terlihat dari kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan di sekitaran pasar, saluran drainase dan area terbuka lainnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan, terlihat bahwa masyarakat cenderung bergantung pada sistem pengangkutan sampah tanpa melibatkan proses pengelolaan lanjutan yang memadai. Fenomena ini menimbulkan dampak yang signifikan, yang tercermin dari minimnya kesadaran di kalangan pedagang akan kepentingan menyediakan wadah sampah yang memadai. Dampak yang dirasakan mencakup akumulasi besar sampah, yang pada akhirnya mengakibatkan penumpukan dan banjir sampah yang mengganggu di sepanjang jalan. Keadaan ini tidak hanya menciptakan aroma yang tidak sedap, namun juga mengganggu kenyamanan pejalan kaki yang melintasi daerah tersebut.

Data ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Sidodadi memang belum efektif dan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan perubahan positif. Sehingga perlu penanganan sampah yang tepat untuk bisa meminimalisir terjadinya permasalahan sampah. Salah satu cara pengelolaan sampah secara terpadu dan menyeluruh yang dapat dilaksanakan dengan saat ini adalah dengan menerapkan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No 18 tahun 2008 dalam pasal 28 ayat (1) bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah oleh karena itu, pelibatan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan sampah karena dengan adanya peran serta keikutsertaan masyarakat dalam upaya penanganan sampah maka masyarakat lebih bisa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dengan cara mengolah sampah lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Model Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Sidodi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar”. Penulis berharap dengan adanya kajian penelitian ini dapat membantu mengatasi permasalahan sampah yang terdapat di Kelurahan Sidodadi sehingga tercipta lingkungan yang sehat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Sidodadi?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi?
3. Bagaimana model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kelurahan Sidodadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi
2. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi
3. Merumuskan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Sidodadi

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait dengan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dibagi ke dalam manfaat bagi akademisi, masyarakat dan bagi pemerintah antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara akademis agar bisa menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang terkait mengenai pengelolaan sampah sebagai salah satu cara penanggulangan sampah.

2. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau wawasan terkait pengelolaan sampah sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dengan cara membuang dan mengelola sampah dengan baik.

3. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah setempat terutama dalam mendukung pengembangan pengelolaan sampah yang baik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian lebih terfokus maka dilakukan pembatasan penelitian. Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup substansi

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi
- b. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi
- c. Memberikan solusi dengan mengidentifikasi penerapan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara terpadu.

2. Ruang lingkup wilayah

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang sistematika penulisan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa bab dengan penjelasan singkat yaitu:

Bab 1 Pendahuluan: Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

Bab 2 kajian Pustaka: Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

Bab 3 Metode Penelitian: Pada bab ini membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis/pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, variable penelitian dan kerangka penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah menurut UU No 18 Tahun 2008 merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengelola dan mengendalikan sampah agar tidak mencemari lingkungan dan memberikan manfaat yang maksimal, yang melibatkan proses mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir sampah. Sedangkan sampah menurut UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam bentuk padat selain itu, limbah tersebut disebut sebagai limbah berbahaya karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya maka diperlukan perlakuan khusus.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, serangkaian kegiatan dalam pengelolaan sampah dimulai dari proses pewadahan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan hingga pengolahan akhir sampah. Berikut adalah penjelasan dari setiap proses tersebut:

1. Pewadahan (Tempat Penampungan Sementara)

Pewadahan adalah proses penampungan sementara sampah di lokasi asalnya, baik di tempat tinggal, tempat kerja, atau fasilitas umum, sebelum sampah tersebut dikumpulkan dan dipindahkan ke tempat yang lebih besar atau diproses lebih lanjut, untuk memastikan bahwa sampah dikelola dengan baik sejak dari sumbernya untuk menghindari pencemaran lingkungan dan memudahkan proses pengumpulan serta pengangkutan. Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pewadahan yang memadai, termasuk menyediakan tempat sampah yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil sampah dari sumbernya (misalnya rumah tangga, industri, atau tempat usaha) dan memindahkannya ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), untuk mengumpulkan sampah secara sistematis untuk mempermudah

proses pengelolaan selanjutnya dan mencegah pembuangan sampah sembarangan. Pengumpulan harus dilakukan secara teratur dan terencana, dengan memperhatikan jenis sampah dan kapasitas pengangkutan yang tersedia.

3. Pemilahan sampah

Pemilahan sampah adalah proses memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya atau beracun (B3), baik di sumber sampah maupun di TPS, untuk memaksimalkan potensi daur ulang dan pengolahan sampah dengan cara memisahkan material yang dapat digunakan kembali atau diolah dari sampah yang harus dibuang. Masyarakat dan pelaku usaha diwajibkan melakukan pemilahan sampah di sumbernya. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas untuk memudahkan pemilahan sampah di TPS.

4. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah adalah proses memindahkan sampah dari TPS ke tempat pemrosesan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah lainnya, untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dan dipilih dengan cara yang efisien dan aman agar tidak mencemari lingkungan selama proses transportasi. Pengangkutan harus dilakukan dengan menggunakan sarana yang sesuai, seperti truk pengangkutan sampah yang dirancang khusus untuk mencegah kebocoran atau penyebaran sampah selama perjalanan.

5. Pengolahan akhir sampah

Pengolahan akhir sampah adalah proses pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) atau melalui metode pengolahan lainnya untuk mengurangi volume sampah, mengubah sifat fisik atau kimia sampah, atau mengolahnya menjadi produk yang bermanfaat, untuk mengurangi dampak negatif lingkungan, meminimalkan volume sampah yang dibuang, dan memisahkan manfaat dari bahan yang masih memiliki nilai ekonomi. Pengolahan sampah di TPA harus dilakukan dengan metode yang aman bagi lingkungan, seperti sanitary landfill, dan harus dilengkapi dengan sistem pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran air, tanah, dan udara.

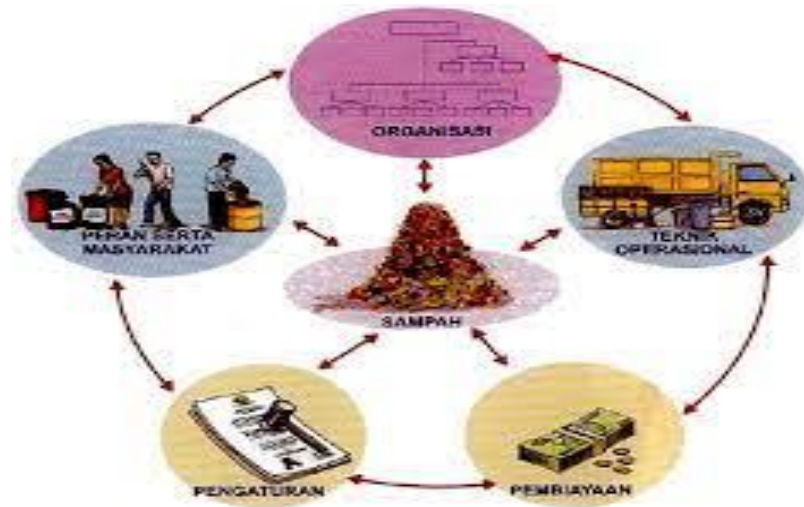
Dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terdapat beberapa prinsip pengelolaan sampah yaitu:

- a. Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), mengurangi sampah sebanyak mungkin dengan cara mengurangi pemakaian barang, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang sampah.
- b. Prinsip tanggung jawab produsen (*Extended Producer Responsibility/EPR*), produsen bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diproduksi, termasuk sampah yang dihasilkan setelah barang tersebut tidak terpakai lagi.
- c. Prinsip kebijakan *Zero Waste*, bertujuan untuk mengurangi, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah sehingga tidak ada sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.
- d. Prinsip pengurangan, pemanfaatan, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah.

2.1.2 Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat.

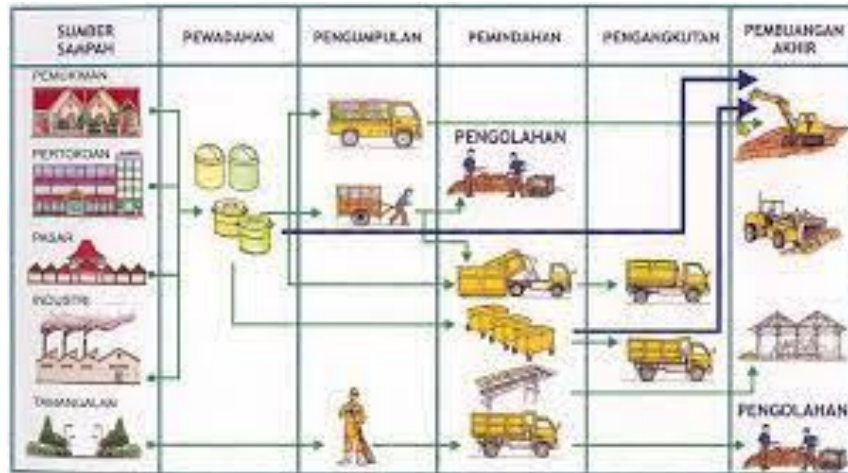
Kelima aspek tersebut di atas ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan sampah antara aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peran serta masyarakat saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri.



Gambar 2. 1 Skema Manajemen Pengelolaan Sampah (Sumber: SNI 19-2454-2002)

1. Aspek Teknis Operasional

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan objek persampahan. Menurut Hartoyo (1998:6), Perencanaan sistem pengelolaan sampah memerlukan model definisi yang seragam sebagai dasar yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah SNI No 19-2454-2002 tentang Tata cara pengelolaan sampah permukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang terpadu yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan, pengolahan.



Gambar 2. 2 Diagram Teknik Pengelolaan Sampah(Sumber: Faizah, 2008)

Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya pengendalian pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya masih perlu menyesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan (Tchobanoglous,1997:363).

Berikut penjelasan mengenai diagram aspek teknik operasional sebagaimana gambar 2.2 adalah sebagai berikut:

1. Penampungan/pewadahan sampah

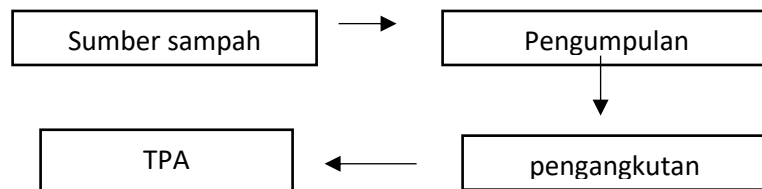
Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan/pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuan adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektivitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan (SNI 19-2454-2002)

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah hingga ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

a. Pola individual

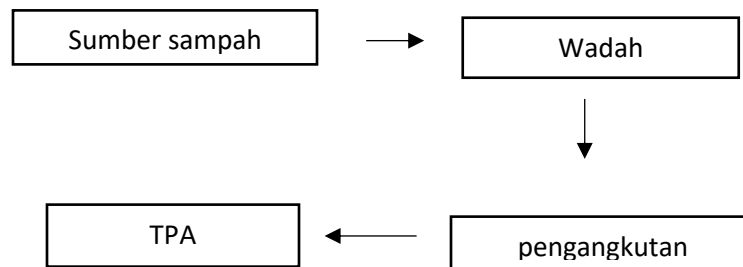
Pola individual merupakan proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara sebelum dibuang ke TPA.



Gambar 2. 3 Pola Pengumpulan Sampah Individual (Sumber: SNI 19-2454-2002)

b. Pola komunal

Pola komunal merupakan proses pengumpulan sampah yang dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau melakukan pembuangan langsung ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa melalui proses pemindahan terlebih dahulu.



Gambar 2. 4 Pola pengumpulan Sampah Komunal (Sumber: SNI 19-2454-2002)

3. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah adalah proses kegiatan yang dilakukan setelah proses pengumpulan sampah di tempat penampungan sampah sementara ke TPA. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truk container tertentu yang

dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat (Faizah, 2008).

4. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah merupakan proses yang dilakukan untuk mengelola sampah setelah tahap pengumpulan dan pengangkutan. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk mengurangi volume sampah, meminimalkan dampak lingkungan, dan memanfaatkan kembali material yang masih dapat digunakan.

Berikut adalah beberapa aspek pengolahan sampah dalam SNI 19-2454-2002:

- a. Daur ulang, proses di mana material yang dapat didaur ulang, seperti plastik, kertas dan logam, dipisahkan dan diolah menjadi produk baru.
- b. Kompasting, pengolahan sampah organik melalui proses alami yang mengubah limbah menjadi pupuk yang berguna.
- c. Pengolahan termal, metode yang melibatkan pembakaran sampah untuk mengurangi volume dan menghasilkan energi.

5. Pembuangan akhir sampah

Pembuangan akhir merupakan tahap terakhir dalam proses pengelolaan sampah, di mana sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut dibuang ke tempat yang ditentukan. Pembuangan akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuang sampah ke lokasi yang telah ditentukan, yaitu tempat pembuangan akhir (TPA). Tujuan dari pembuangan akhir adalah untuk mengelola sampah secara efektif, mencegah pencemaran lingkungan, dan menjaga kesehatan masyarakat. Berikut kriteria dalam SNI 19-2454-2002

- a. Lokasi yang strategis, TPA harus berada di lokasi yang tidak mengganggu pemukiman dan lingkungan sekitar.
- b. Pengelolaan lingkungan, TPA harus dilengkapi dengan sistem pengelolaan untuk mengatasi masalah air lindi dan gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah.
- c. Keamanan dan kesehatan, TPA harus dirancang untuk mencegah risiko kesehatan dan keselamatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar.

Dalam SNI No 19-2454-2002 juga dibedakan menjadi 3 metode yaitu:

a. Metode *Open Dumping*

Metode ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b. Metode *Controlled Landfill* (penimbunan terkendali)

Metode ini merupakan sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah yang dilakukan setelah TPA penuh dengan melalui proses pemadatan.

c. Metode *Sanitary Landfill* (Lahan Urug Saniter)

Metode ini merupakan proses yang dilakukan dengan cara ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Hal ini dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

2. Aspek kelembagaan

Organisasi dan manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah. Kelembagaan sistem pengelolaan mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal (Faizah,2008).

Jumlah penanggung jawab pengelolaan sampah harus cukup mencakupi sesuai ruang dan lingkup fungsinya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1.000 penduduk yang dilayani, sedangkan sistem pengangkutan, sistem transportasi, sistem pembuangan akhir dan staf, minimal 1 orang per 1.000 penduduk (SNI 19-2454-2002).

Bentuk kelembagaan untuk berbagai kategori kota di Indonesia disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Persampahan

No	Kategori kota	Jumlah penduduk (jiwa)	Bentuk kelembagaan
1.	Kota Raya (Metropolitan) Kota Besar	>1.000.000 500.000-1.000.000	Perusahaan Daerah, Dinas tersendiri
2.	Kota Sedang	250.000-500.000	Dinas tersendiri
3.	Kota sedang II	100.000-250.000	Dinas/ Suku Dinas, - UPTD/PU, Seksi /PU
4.	Kota kecil	20.000-100.000	UPTD/PU, - Seksi/PU

Sumber: SNI T-13-1990

3. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak yang berfungsi untuk membiayai sistem pengelolaan sampah agar dapat bergerak dengan lancar. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan di daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan stuktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasari metode yang benar.

Biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan (SNI T-12-1991-03). Adapun perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah yakni:

- Biaya pengumpulan 20% - 40%
- Biaya pengangkutan 40% - 60%
- Biaya pembuangan akhir 10% - 30 %

Biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari masyarakat (80%) dan pemerintah daerah (20%) yang digunakan untuk pelayanan umum.

Menurut Syafaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi sampah adalah 1% dari penghasil per rumah tangga. Dengan demikian besaran retribusi sampah bervariasi sesuai tingkat pendapatan, makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga maka makin besar retribusi yang harus mereka bayarkan karena semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang makin besar sampah yang mereka hasilkan.

4. Aspek Peraturan/Hukum

Prinsip aspek pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi (Hartoyo, 1998:8):

1. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan sampah.
2. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
3. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

Peraturan ini pada dasarnya melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah. Tanpa adanya Partisipasi masyarakat, program pengelolaan sampah apa pun yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk mendukung program kebersihan pemerintah adalah dengan membiasakan masyarakat berperilaku sesuai program pengelolaan sampah, khususnya mengubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara tertib, lancar dan efektif, sinkron sehingga bisa mengubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.

Bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan atau pembuangan sampah antara lain: pengetahuan tentang sampah/kebersihan, rutinitas pembayaran retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, kegiatan kerja bakti, penyediaan tempat sampah.

2.1.3 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

Partisipasi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah dapat berupa pemilahan antara sampah organik sampah anorganik dalam proses pewadahan, atau melalui pembuatan kompos dalam skala keluarga dan mengurangi penggunaan barang yang tidak mudah terurai. Partisipasi dapat diukur melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan (Candra 2012). Bila dikaitkan dengan pengelolaan sampah, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari ikut serta menjadi anggota organisasi yang berkaitan dengan masalah sampah yang berperan dalam merencanakan sistem pengelolaan sampah yang baik.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengelola sampah menjadi suatu benda lain yang memiliki manfaat. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah baik dalam bentuk sumbangan tenaga, ide, pikiran, maupun materi. Partisipasi merupakan modal yang penting bagi program pengelolaan sampah untuk dapat berhasil mengatasi permasalahan mengenai sampah rumah tangga yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat, terutama di perkotaan.

Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari karakteristik individu maupun pengaruh dari lingkungan eksternal individu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pertisipasinya terhadap pengelolaan sampah, di antaranya sebagai berikut.

1. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pengelolaan sampah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Berdasarkan hasil penelitian Riswan et al.(2011), pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah untuk menjaga kebersihan lingkungannya.

2. Kesadaran lingkungan

Kesadaran lingkungan termasuk dalam pengelolaan sampah, yang dipengaruhi oleh sikap individu, norma, sosial dan persepsi mereka terhadap kontrol atas tindakan tersebut. Semakin besar kesadaran dan keyakinan bahwa tindakan mereka memiliki dampak positif, semakin besar partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah (Ajzen, 1991).

3. Fasilitas pendukung

Mengukur ketersediaan fasilitas seperti tempat sampah terpilah di rumah atau TPS yang memadai.

4. Dukungan pemerintah dan kebijakan

Persepsi masyarakat terhadap dukungan pemerintah dalam pengelolaan sampah, seperti adanya regulasi, insentif atau sanksi bagi warga yang tidak mematuhi aturan pengelolaan sampah.

Dalam konteks ini, partisipasi memiliki tiga komponen esensial, yaitu:

- a. Adanya Rasa Tanggung Jawab,
- b. Kemauan Untuk Memberikan Kontribusi Demi Mencapai Tujuan Bersama
- c. Keterlibatan aktif individu dalam kelompok tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada dasarnya adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuangan, transportasi dan pengelolaan sampah. Hal ini didasarkan pada rasa kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama yaitu lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam kata lain, partisipasi masyarakat keterlibatan spontan dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok demi mencapai tujuan yang sama.

a) Jenis-jenis partisipasi masyarakat

Partisipasi tidak selalu bergantung pada kesadaran dan inisiatif warga masyarakat, tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari pihak atas untuk mencapai tujuan. Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldmith (1979:51) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang merencanakan program pembangunan yang bisa dilaksanakan, serta menyusun rencana kerja.

2. Tahap pelaksanaan, merupakan tahap terpenting dalam program, inti dari keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk kontribusi pemikiran, bentuk kontribusi materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota.
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan sebuah partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program.

Partisipasi menurut Hamijoyo (2007:21) dapat dijabarkan menjadi

1. Partisipasi pemikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau konstruksi pikiran dalam merancang dan menjalankan program. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kegiatan dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.
2. Partisipasi tenaga adalah kontribusi dalam bentuk upaya fisik atau kerja keras untuk mendukung keberhasilan suatu program.
3. Partisipasi keterampilan adalah memberikan bantuan dengan menggunakan keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.
4. Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang barang atau harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja.
5. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

2.1.4 Tingkat partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan sebuah proses yang memiliki tingkatan partisipasi untuk membedakan cara dan tingkat keterlibatan masyarakat. Konsep ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menilai partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Hetifah Sj. Sumarto, seorang praktisis di Indonesia, mengelompokkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Tinggi
 - a. Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan Secara mandiri mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan.
 - b. Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan.
2. Sedang
 - a. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan tertentu.
 - b. Masyarakat dapat menyuarkan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian.
3. Rendah
 - a. Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah,
 - b. Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagian bahan pertimbangan saja.
 - c. Masyarakat masih sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulant akan terhenti juga.

2.2 Tinjauan Kebijakan

2.2.1 Aspek hukum dan peraturan

Pada dasarnya pengelolaan sampah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hal pengelolaan sistem sanitasi. Dalam hal pengelolaan sampah secara nasional sudah dibuat suatu kebijakan dan strategi pelaksanaannya, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRTM/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Rumusan kebijakan tersebut antara lain:

1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya.
2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan.
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.
4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan.

5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Berdasarkan PP No.18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam pasal 22 UU RI Nomor 18 tahun 2008 mengatur mengenai penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah sementara atau dari tempat penampungan sampah sementara dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan terakhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara umum.

Pengelolaan sampah sendiri terdiri dari:

- a. Pemadatan
- b. Pengomposan
- c. Daur ulang materi
- d. Mengubah sampah menjadi sumber energi

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam karakteristik sampah, teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, kondisi masyarakat sosial masyarakat. (Plano Madani,2018).

Kebijakan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat menjadi lebih efektif jika hanya didomisi oleh aktor pemerintah. Dalam hal ini kebijakan yang melibatkan masyarakat mempunyai keuntungan dimana masyarakat menikmati lingkungan yang bersih.

Secara normatif terdapat sejumlah kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah, diantaranya UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dimana UU ini menjelaskan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Namun hal ini justru menjadi *policy problem* karena efektivitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya masalah substansi, struktural, maupun kultural. Kemudian diterbitkan kebijakan yang baru yaitu UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan ke depan yang mempunyai peran penting. Dengan peraturan perundang-undangan yang baru disahkan ini pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membuat kajian lingkungan hidup yang strategis.

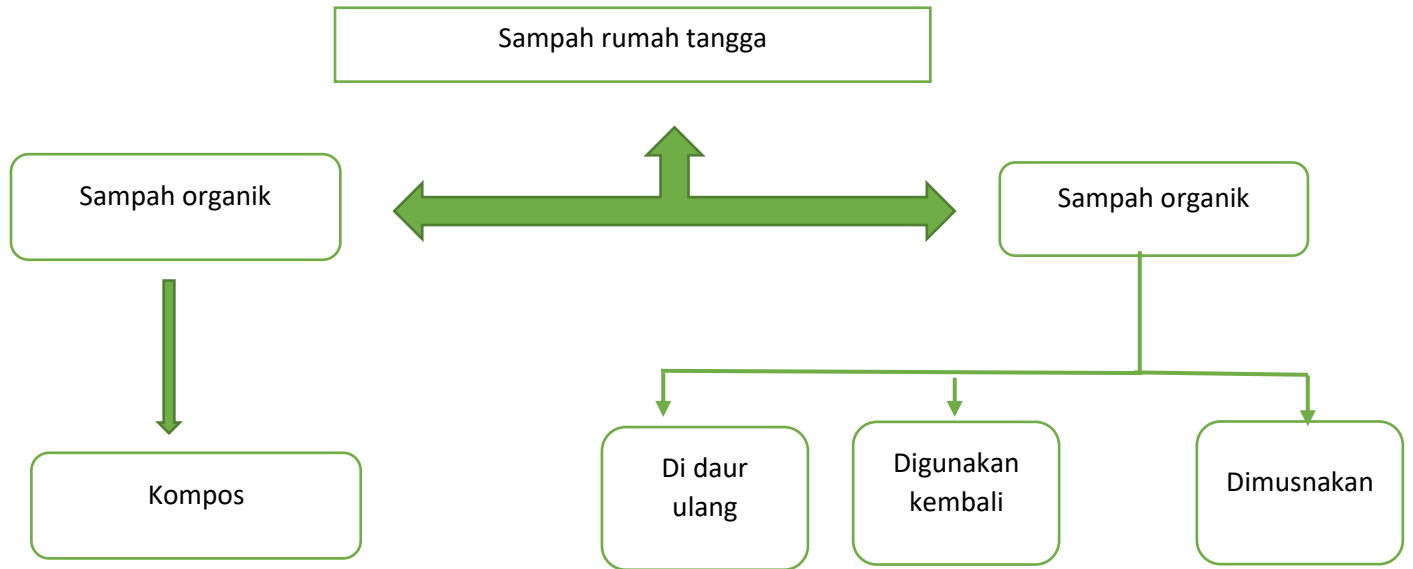
Kebijakan yang tepat dengan keterlibatan masyarakat dari aspek formulasi sampai implementasi mampu menjawab permasalahan lingkungan hidup dan sampah. Masyarakat sebagai warga berdampingan dengan lingkungan mempunyai kepentingan terbesar atas kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah agar mereka dapat hidup dengan tingkat kesehatan lingkungan yang baik.

2.2.2 Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menggabungkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan, pemilahan, daur ulang, dan pengelolaan sampah. Tujuan utamanya adalah mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan di mana masyarakat lokal aktif terlibat dalam pengumpulan, pemisahan, pengolahan, dan manajemen sampah di wilayah tertentu. Tujuan model ini adalah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, mengurangi volume sampah yang lebih bersih dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu:

- a. Kesadaran masyarakat
Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik ditingkatkan melalui pendidikan, kampanye informasi, dan pelatihan. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk mengerti dampak buruk sampah yang tidak terkendali terhadap lingkungan dan kesehatan mereka.
- b. Pengumpulan dan pemisahan sampah
Masyarakat diberdayakan untuk mengumpulkan sampah mereka sendiri, memisahkannya menjadi sampah organik dan non-organik, serta mendaur ulang jika memungkinkan. Ini sering melibatkan pembagian wadah pengumpulan yang sesuai untuk masing-masing jenis sampah.
- c. Komunitas yang terorganisir
Model ini menggalang komunitas lokal untuk membentuk kelompok atau komite pengelolaan sampah yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pemisahan, dan pengolahan sampah di wilayah mereka. Mereka dapat mengoordinasikan upaya bersama, membuat jadwal pengumpulan, dan memonitor kepatuhan terhadap praktik pengelolaan sampah.
- d. Pengolahan sampah
Sampah organik yang dikumpulkan bisa diolah menjadi kompos melalui metode pengomposan. Sementara sampah non-organik yang tidak dapat didaur ulang harus dibuang dengan aman.
- e. Partisipasi aktif masyarakat
Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana pengelolaan sampah harus dilakukan di wilayah mereka. Mereka juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan model ini memberikan masukan untuk perbaikan.
- f. Kerja sama dengan pemerintah terkait
Kerja sama dengan pemerintah lokal dan lembaga terkait adalah kunci untuk mendukung model pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan teknis, fasilitas pengolahan, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung praktik ini.



Gambar 2. 5 model pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Sumber: Environment services program 2011, hal 13)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu sudut pandang penulis dalam melakukan penelitian untuk memungkinkan penulis memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap penelitian yang dilakukan. Presentasi penelitian sebelumnya ini disediakan untuk referensi dan dukungan terhadap evaluasi penulis dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
1.	Ika Artika dan Mochammad Khaerul, Model Sistem Dinamik Untuk Evaluasi Skenario Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Depok, 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Data kependudukan • Data kondisi ekonomi • Timbulan sampah • Tingkat pelayanan • Sampah tertangani • Sampah tidak tertangani • Sumber sampah • Komposisi sampah, • Sampah permukiman • Sampah non permukiman • Sampah yang terurai • Sampah residu • Sampah rumah tangga • Sampah pasar dan kawasan 	Metode yang digunakan yaitu wawancara dan pengambilan data sekunder dari instansi pemerintah terkait hasil penelitian terdahulu.	Analisis yang digunakan adalah simulasi model dengan menggunakan perangkat lunak STELLA 9.1.3.	Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan dalam memilih scenario terbaik adalah scenario yang menghasilkan nilai terendah pada sampah terangkut ke TPA, kebutuhan lahan, biaya pengelolaan sampah, dan beban emisi.	Dalam penelitian ini, meskipun metode yang digunakan tetap sama, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan analisis.

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
2.	Samsuri dan Lucky Himat Maulana, Model Pengelolaan Sampah Perkotaan (Survey pada pengelolaan persampahan kota bogor) 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi:investasi (E1),opersional (E2), pemeliharaan (E3) • Lingkungan: Udara (L1),Air (L2),Habitat penyakit (L3), Estetika (L4) • Sosial:Penerimaan masyarakat (S1),Partisipasi masyarakat (S2),Tenaga kerja (S3) • Teknik:Lahan (T1),Opersional (T2),SDM (T3) • Pemasaran:Komersialisasi (P1),Distribusi (P2) 	Metode yang digunakan adalah pendekatan metode ANP yang digunakan dalam menentukan prioritas alternatif pengolahan sampah organik di kawasan perkotaan.	Analisis yang digunakan adalah depece and driving analysis (DDPA) yang mampu menggambarkan kekuatan keterkaitan dan pengaruh antar kriteria.	Model jaringan pemilihan alternatif model pengomposan terbaik menunjukkan hubungan yang kompleks antar subkriteria yang mempengaruhi pengambilan keputusan.	Dalam konteks penelitian ini, perbedaan terlihat pada metode yang diterapkan, termasuk dalam tahap analisis. Meskipun demikian penting untuk mencatat bahwa perubahan ini masih berkaitan dengan pemilihan model pengelolaan sampah yang dianggap paling sesuai dengan konteks pengelolaan sampah yang diteliti.

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
3.	Dewi Nurkomalasari, Pengembangan model pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di RW 08 Merbabu Asih kota Cirebon, 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan lingkungan • Partisipasi masyarakat • Kemandirian • Perlindungan lingkungan dan keterpaduan 	Metode yang digunakan adalah gabungan kualitatif serta penelitian pengembangan atau research and development (R&D)	Analisis yang digunakan adalah pengembangan model yang dilakukan dengan uji DP (deskriptif presentasi) dan diimplementasikan dalam bentuk uji coba dan sosialisasi ke masyarakat.	Dalam penelitian ini bahwa model pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di RW 08 Merbabu Asih menggunakan konsep 3R pengembangan model pengelolaan sampah ini merupakan salah satu solusi untuk	Dalam penelitian ini peneliti menerapkan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan metode kualitatif.

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
					dilaksanakan guna menyikapi permasalahan yang dihadapi.	
4.	Agnes fitria Widyanto, OKtavia catur Pratiwi dan Saudin Yuniarto, Model pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Banyumas, 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis sinergi stakeholder • Pengurangan sampah • Pengumpulan sampah • Pengangkutan sampah • Pemrosesan • Daur ulang • Pembuangan sampah di sumbernya • Kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan khususnya dalam hal 	Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan Analisa data kualitatif yang bersifat terbuka dengan menggunakan proses berpikir induktif dengan menggunakan	Analisis kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif (Interaktif model of analysis)	Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan masalah sampah. Kendalan	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan pada beberapa variable penelitian yang digunakan.

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
		kebiasaan mengurangi sampah di sumbernya.	model analisis interaktif			
5.	Sudiro Arief Setyawan dan Lukman Nulhakim, Model pengelolaan sampah permukiman di Kelurahan Tunjung sekar Kota Malang, 2018	<ul style="list-style-type: none"> • sarana dan prasarana pengelolaan sampah • Kondisi persampahan dan pengelolaannya • Timbulan sampah • .Komposisi sampah • Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R 	Metode yang digunakan metode deskriptif-kualitatif	Analisis adalah analisis data yang dilakukan dengan metode dekriptif-kualitatif.	Pengelolaan sampah di Tunjung sekar masih menggunakan kumpul-angkut-Buang. Untuk itu rekomendasi pengelolaan sampah berbasis 3R terhadap masyarakat setempat dengan prinsip	Dalam penelitian ini terdapat konsistensi dalam analisis yang digunakan, meskipun metode penelittian yang diterapkan berbeda.

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
					reuse-reduce-recycle.	
6.	Ade Iskandar dan Rahim Doli Patuan sakti siregar, Model pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang, 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Timbulan sampah • Penampungan/ pemilahan sampah • Pengelolaan pengangkutan sampah • Pembuangan akhir • Sarana pembuangan sampah (TPS dan TPA) • Partisipasi masyarakat. 	Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi	Analisis yang digunakan adalah analisis data dengan kualitatif pendekatan deskriptif.	Pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang berhasil dengan prinsip 3R: kurangi, gunakan Kembali, daur ulang. Masyarakat ikut memilah sampah. Tantangannya adalah	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dalam proses pengambilan data atau metode yang diterapkan, sementara perbedaan terdapat dalam proses analisisnya.

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
					mengubah pandangan buang sampah menjadi memanfaatkan sampah.	
7.	Wildanurrizal achmad bahauddin dan Putro ferro ferdinant, Perencanaan Model simulasi pengelolaan sampah dengan pendekatan sistem dinamis di Kota Cilegon, 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk • Pemilahan sampah • Pengumpulan sampah • Pengangkutan sampah • Pemrosesan akhir sampah 	Metode penelitian adalah model simulasi dengan pendekatan dinamis	Analisis yang digunakan adalah analisis dengan membuat model simulasi untuk mendapatkan gambaran fenomena alternatif yang dirancang dapat meningkatkan pelayanan kebersihan.	Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa dengan menggunakan model simulasi dengan pendekatan sistem dinamis, dapat dirancang alternatif pengelolaan	Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan penggunaan metode dan analisis yang diterapkan.

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
					sampah yang dapat meningkatkan pelayanan kebersihan Kota Cilegon.	
8.	Made Armadi, Wayan Suarna, Made Sudarman, Made Mahendra dan Nyoman Sudipa, Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat, di Kota Denpasar, 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk • Partisipasi masyarakat • Pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah • Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah • Anggaran terbatas • Sumber daya manusia yang terbatas 	Metode kualitatif dan kuantitatif.	Dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis yaitu Interpretative structural modeling (ISM), analisis hubungan kontekstual antar sub elemen, analisis swot, analisis regresi dan analisis statistic deskriptif.	Dalam penelitian ini merumuskan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kota Denpasar. Dimana penelitian ini menunjukkan bahwa elemen	Dalam penelitian ini, terdapat konsistensi penerapan metode yang digunakan.

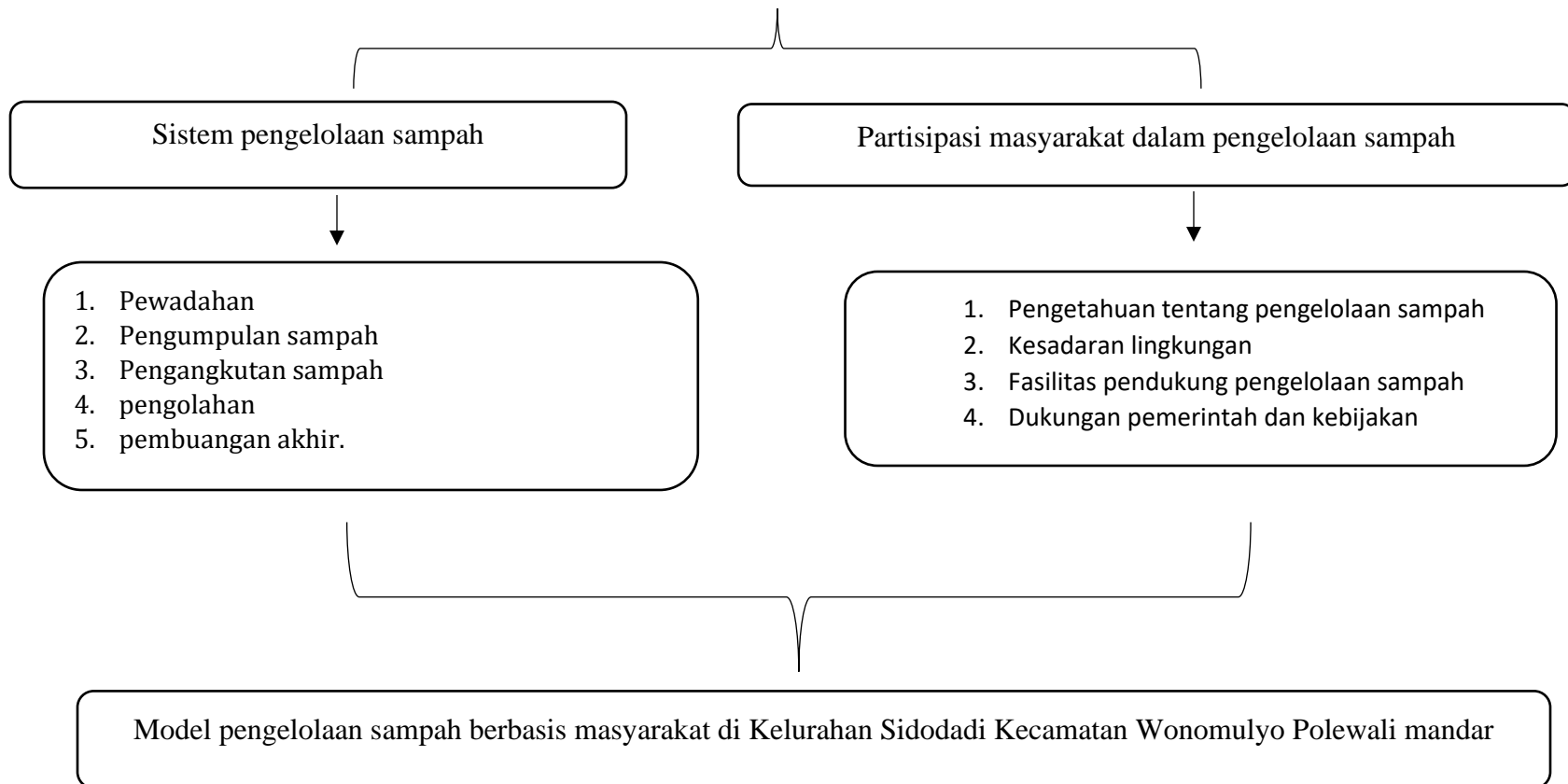
No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum yang lemah dan regulasi yang tidak memadai. 			masyarakat yang berpengaruh dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga adalah ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelajar muda.	
9.	Ida Ayu Nyoman, I N Mahendra Yasa dan I Made Jember, Partisipasi masyarakat dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman masyarakat tentang sampah • Kemauan masyarakat 	Metode yang digunakan yaitu metode survei dengan teknik pengumpulan	Analisis penelitian yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda	Pemahaman, kamuan, dan pendapatan masyarakat secara	Dalam penelitian ini, terdapat konsistensi penerapan analisis yang digunakan serta variabel

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
	pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah • Pendapatan masyarakat 	data melalui observasi lapangan dan kusioner.	dengan menggunakan statistical product and service solution (SPSS).	bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung.	penelitian yang digunakan.
10.	Tini Parmawati Endang Hermawan dan Sri listyarini, Pemodelan system pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Volume timbulan sampah • Jumlah penduduk 	Metode yang digunakan adalah pendekatan pemodelan sistem dinamik, dengan menggunakan	Analisis yang digunakan yaitu analisis data sekunder dan data primer.	Timbulan sampah di kabupaten Tana Tidung meningkat seiring dengan peningkatan jumlah	Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan penerapan analisis yang digunakan.

No	Nama, Judul penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Analisis penelitian	Kesimpulan	Perbandingan
	Tana Tidung dengan pendekatan system dynamic, 2023		struktur utama yaitu Causal Loop Diagram (CLD) untuk mendeskripsikan sebab akibat dari variable dan struktur kedua yaitu Stock Flow Diagram (SFD) untuk kemudian memasukan data numerik ke dalam simulasi model.		penduduk di Kabupaten Tana Tidung, dengan perilaku yang dihasilkan berupa kurya yang cenderung meningkat atau kuryanya akan membentuk perilakunya eksponensial Growth.	

2.4 Kerangka pemikiran

Kelurahan Sidodadi merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan perdagangan yang telah ditetapkan dalam RTRW Polewali Mandar Perda Nomor 2 tahun 2013 dalam pasal 39 ayat (1). Sejak ditetapkannya daerah tersebut menjadi kawasan perdagangan mengakibatkan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sidodadi mengalami peningkatan. Hal inilah yang menjadi pemicu banyaknya timbulan sampah di daerah tersebut karena tidak didukung dengan pengelolaan sampah yang baik serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.



BAB V

Kesimpulan Dan Saran

Lampiran I

Dokumentasi





5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi

Sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi saat ini belum optimal. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa masalah, antara lain:

- a. Fasilitas pembuangan sampah belum memadai dan distribusinya belum merata.
- b. Rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumber.
- c. Ketidacukupan armada pengangkut sampah mengakibatkan banyak sampah yang tidak terangkut.
- d. Pengolahan sampah belum optimal.
- e. Penutupan TPA mengakibatkan sampah diangkut ke kantor camat untuk dibakar, sehingga menimbulkan masalah baru seperti polusi udara.
- f. Fasilitas “MATAPPA” yang baru didirikan belum beroperasi secara optimal dan belum banyak diketahui oleh masyarakat.

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kelurahan Sidodadi masih rendah. Partisipasi masyarakat terbatas pada pembuangan sampah di lokasi yang telah ditentukan.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Sidodadi meliputi:
 - a) Kesadaran lingkungan

- b) Dukungan pemerintah dan kebijakan yang memadai
 - c. Pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan ketersediaan fasilitas pendukung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat.
3. Model Pengelolaan Sampah Berbasis masyarakat:
- a. Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang optimal di Kelurahan Sidodadi adalah model terpadu yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pengelolaan sampah.
 - b. Model ini mengintegrasikan beberapa pendekatan, yaitu:
 - a) Optimalisasi fasilitas “MATAPPA” untuk pengolahan sampah organik dan anorganik.
 - b) Pengembangan sistem pemilahan sampah di sumber.
 - c) Peningkatan layanan pengangkut sampah.
 - d) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
 - e) Penguatan kelembagaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
 - c. Implementasi model ini memerlukan dukungan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum dan kebijakan yang tegas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang dapat direkomendasikan adalah agar pemerintah Kelurahan Sidodadi meningkatkan sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah, mengoptimalkan fasilitas “MATAPPA”, serta menerapkan kebijakan yang tegas terkait pengelolaan sampah. Masyarakat Kelurahan Sidodadi perlu meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, pemanfaatan sarana “MATAPPA”, dari program pengelolaan sampah. Peneliti selanjutnya menyarankan untuk menilai efektivitas model pengelolaan sampah dan mengembangkan model yang lebih inovatif. Kolaborasi sinergi antara pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kelurahan Sidodadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1991, Standar Nasional Indonesia (SNI) S –04 – 1991 – 03 tentang Spesifikasi Timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1992, Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-1992 tentang Tata cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Candra, S. (2012). ERP implementation success and knowledge capability. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 65, 141-149.
- Deng, Y., Chin, Y. W., Chai, H. B., De Blanco, E. C., Kardono, L. B., Riswan, S., ... & Kinghorn, A. D. (2011). Phytochemical and bioactivity studies on constituents of the leaves of *Vitex quinata*. *Phytochemistry letters*, 4(3), 213-217.
- FAIZAH, F. (2008). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)* (Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Hartoyo, 1998. Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa Timur, Bahan Seminar Nasional Indonesia, SN, & Nasional, BS (2002). Tata cara operasional pengelolaan sampah perkotaan. *Badan Standarisasi Nasional, Jakarta*.
- Indonesia, SN, & Nasional, BS (2002). Tata cara operasional pengelolaan sampah perkotaan. *Badan Standarisasi Nasional, Jakarta*.

- Mardalis. 2008. *Metodologi Peneitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahlil, M., Mustaqim, M., Fatimah, F., & Furqan, M. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Menjadi Produk Bernilai Ekonomi (Studi Di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* , 7 (1), 65-78.
- Nurkomalasari, D. (2014). PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI RW 08 MERBABU ASIH KOTA CIREBON. *Journal of Educational Social Studies*, 3(2).
- Pemerintah Daerah. 2013. *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar*.
- Pemerintah Pusat. 2008. *Undang-undang tentang pengelolaan sampah*.
- Rahardyan, B., & Widagdo, A. S. (2005). Peningkatan pengelolaan persampahan perkotaan melalui pengembangan daur ulang. *Materi Lokakarya*, 2.
- Sudiro, S., Setyawan, A., & Nulhakim, L. (2018). Model Pengelolaan Sampah Permukiman di Kelurahan Tunjung Sekar Kota Malang. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 7(1), 106-117.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*.
- Slamet, Doni. 2008. *Mengolah Limbah Rumah Tangga*. Bandung: Sangrila Pustaka.
- Tchobanoglous, G., Teisen H., Eliassen, R, 1993, *Integrated Solid Waste Manajemen*, Mc.Graw Hill : Kogakusha, Ltd.
- Tchobanoglous. 1997. *Aspek teknik operasional untuk meninjau pertumbuhan sampah*. Yogyakarta: Kanisius
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- Widiyanto, AF, Pratiwi, OC, & Yuniarno, S. (2017, November). Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas. Dalam *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed* (Vol.7, No.1).
- Wildanurrizal, W., Bahauddin, A., & Ferdinant, PF (2014). Perancangan Model Simulasi Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Sistem Dinamis Di Kota Cilegon. *Jurnal Teknik Industri Untirta* , 2 (3).
- Yuliasuti, I. A. N., Yasa, I. N. M., & Jember, I. M. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(6), 374-393.
- Yones, I. (2007). Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau. *Universitas Diponegoro Semarang*.